

Pemanfaatan Portal Satu Data Lombok Tengah Untuk Mendukung Evidence-Based Policy Making Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

*Widiya Yuska, Ikhbaluddin

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Indonesia

Artikel Histori:

Disubmit: Juni 2026

Diterima: Juli 2026

Diterbitkan: Agustus 2026

DOI

[10.33005/jifti.v8i1.220](https://doi.org/10.33005/jifti.v8i1.220)



ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi pemanfaatan Portal Satu Data Lombok Tengah sebagai sistem informasi data terbuka pemerintah daerah untuk mendukung evidence-based policy making. Topik ini penting karena portal data tidak hanya menjadi media publikasi, tetapi juga infrastruktur informasi yang menentukan akses, kualitas data, interoperabilitas, dan dukungan keputusan publik. Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan Information System Success Model untuk menilai portal daerah melalui kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, dan manfaat sistem. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan observasi portal, wawancara semi-terstruktur terhadap enam informan kunci, dan dokumentasi regulasi serta dokumen teknis. Data dianalisis secara tematik dan divalidasi melalui triangulasi sumber serta teknik. Hasil menunjukkan portal telah mendukung akses dataset sektoral dan keterbukaan informasi, tetapi pembaruan data, metadata, interoperabilitas, dan kapasitas operator belum optimal. Penelitian menyimpulkan perlunya standarisasi metadata, pembaruan data berkala, penguatan infrastruktur, serta literasi data agar portal menjadi sistem pendukung keputusan yang lebih andal dan terintegrasi di tingkat daerah.

Kata Kunci: Portal Satu Data, sistem informasi, open government data, Information System Success Model, evidence-based policy making.

How to Cite:

Yuska, W., & Ikhbaluddin. (2026). Pemanfaatan Portal Satu Data Lombok Tengah untuk Mendukung Evidence-Based Policy Making pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah. Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Robotika, 8(1), 36–46. <https://doi.org/10.33005/jifti.v8i1.220>.

*Corresponding Author:

Email : diyayuska12@gmail.com

Alamat: Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN),
Indonesia



This article is published under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemerintahan modern tidak lagi cukup dipahami sebagai pelaksanaan kewenangan negara, tetapi juga sebagai proses pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan [1]. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah diberi ruang untuk mengatur urusan pemerintahan sesuai kebutuhan lokal agar pelayanan publik menjadi lebih responsif dan relevan [2]. Desentralisasi juga menuntut pemerintah daerah memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat dalam mengelola informasi, sumber daya, dan proses pengambilan keputusan [3]. Oleh karena itu, kualitas tata kelola pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan birokrasi dalam bekerja secara efektif, transparan, dan akuntabel [4].

Perkembangan pemerintahan digital mendorong data menjadi salah satu aset strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah [5]. Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses dapat memperkuat dasar perumusan kebijakan publik yang lebih rasional dan terukur [6]. Dalam perspektif *open government*, keterbukaan data tidak hanya berfungsi sebagai sarana publikasi informasi, tetapi juga sebagai instrumen transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pemerintah [7]. Pemanfaatan *open government data* juga dapat membantu pemerintah membangun hubungan yang lebih terbuka dengan masyarakat melalui akses informasi publik yang lebih luas [8].

Di Indonesia, penguatan tata kelola data pemerintahan diwujudkan melalui kebijakan Satu Data Indonesia sebagai upaya membangun data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan [9]. Kebijakan tersebut penting karena penyelenggaraan pemerintahan sering menghadapi persoalan ego sektoral, perbedaan standar data, dan lemahnya integrasi informasi antarinstansi [10]. Implementasi Satu Data Indonesia membutuhkan standar data, metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi yang konsisten agar data dapat digunakan lintas sektor [11]. Namun, pelaksanaan kebijakan satu data di daerah masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi data, dan belum meratanya kapasitas aparatur [12].

Keterbukaan data publik memiliki hubungan erat dengan agenda *evidence-based policy making* karena kebijakan yang baik perlu dibangun dari bukti empiris yang valid dan relevan [6]. *evidence-based policy making* menekankan bahwa keputusan publik sebaiknya tidak hanya bertumpu pada intuisi, kebiasaan birokratis, atau tekanan politik semata [5]. Dalam praktik pemerintahan daerah, data sektoral yang tersedia melalui portal satu data dapat menjadi sumber bukti untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan [9]. Akan tetapi, portal data tidak otomatis menghasilkan kebijakan berbasis bukti apabila data yang tersedia belum mutakhir, belum lengkap, atau belum digunakan secara konsisten oleh pengambil keputusan [13].

Kabupaten Lombok Tengah menjadi salah satu daerah yang telah mengembangkan Portal Satu Data sebagai media pengelolaan dan penyebaran data sektoral daerah [14]. Keberadaan portal tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data [15]. Peningkatan Indeks SPBE Lombok Tengah dari tahun ke tahun juga memperlihatkan adanya kemajuan dalam tata kelola digital daerah [16]. Namun, peningkatan kinerja digital belum selalu menunjukkan bahwa data telah digunakan secara optimal dalam proses pengambilan keputusan publik [17].

Dalam konteks Portal Satu Data Lombok Tengah, persoalan utama tidak hanya terletak pada ketersediaan portal, tetapi juga pada kualitas data, keterbaruan dataset, konsistensi metadata, dan integrasi sistem antarperangkat daerah [11]. Perbedaan tingkat partisipasi perangkat daerah dalam memperbarui data dapat menghambat terbentuknya basis informasi yang utuh untuk mendukung perencanaan pembangunan [12]. Keterbatasan interoperabilitas juga dapat membuat data tetap terfragmentasi meskipun sudah dipublikasikan melalui platform digital [10]. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan portal data daerah sangat bergantung pada kombinasi antara regulasi, teknologi, sumber daya manusia, dan budaya kerja berbasis data [9].

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah memiliki posisi strategis sebagai pengelola sistem informasi pemerintahan dan penguatan data sektoral daerah [14]. Peran Diskominfo tidak hanya berkaitan dengan penyediaan portal, tetapi juga mencakup koordinasi walidata, pembinaan operator, pengelolaan infrastruktur digital, dan penguatan kualitas data [16]. Dalam kerangka *evidence-based policy making*, Diskominfo perlu memastikan bahwa data tidak berhenti sebagai arsip digital, tetapi benar-benar digunakan sebagai dasar analisis kebijakan publik [6]. Oleh karena itu, efektivitas Portal Satu Data Lombok Tengah perlu dilihat dari sejauh mana portal tersebut mendukung ketersediaan bukti, pemanfaatan bukti, kapasitas kelembagaan, serta konteks politik dan organisasi [5].

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas implementasi Satu Data Indonesia, *open government data*, keterbukaan informasi publik, dan tata kelola data pemerintahan [8]. Penelitian tentang open data menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dapat memperkuat transparansi, tetapi pemanfaatannya masih dipengaruhi oleh kualitas data dan kesiapan pengguna [13]. Kajian mengenai implementasi Satu Data Indonesia juga menegaskan bahwa kualitas data, interoperabilitas, dan kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci keberhasilan kebijakan [11]. Meski demikian, kajian yang secara khusus menempatkan portal satu data daerah sebagai instrumen pendukung *evidence-based policy making* pada tingkat kabupaten masih relatif terbatas [12].

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai pemanfaatan Portal Satu Data Lombok Tengah menjadi penting untuk dilakukan secara lebih mendalam [14]. Penelitian ini tidak hanya melihat keberadaan portal sebagai bentuk transformasi digital, tetapi juga menelaah bagaimana portal tersebut digunakan dalam proses perencanaan, evaluasi, dan pertimbangan kebijakan [6]. Fokus penelitian diarahkan pada pemanfaatan portal, tata kelola ketersediaan data, serta faktor pendukung dan penghambat pemanfaatannya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah [5]. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola data daerah dan pengembangan praktik *evidence-based policy making* di lingkungan pemerintah daerah [9].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan evaluasi sistem informasi. Objek penelitian adalah Portal Satu Data Lombok Tengah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah. Evaluasi menggunakan *Information System Success Model* yang mencakup lima dimensi, yaitu *system quality*, *information quality*, *service quality*, *use*, dan *net benefit* [18]. Model ini dipilih karena

sesuai untuk menilai keberhasilan sistem informasi berbasis web, termasuk portal data pemerintah daerah.

Rancangan dan Tahapan Penelitian

Penelitian dilakukan melalui enam tahapan operasional. Pertama, identifikasi fungsi dan fitur Portal Satu Data Lombok Tengah, meliputi menu dataset, organisasi, publikasi, infografik, metadata, format data, dan waktu pembaruan. Kedua, penyusunan indikator evaluasi berdasarkan *Information System Success Model*. Ketiga, penyusunan pedoman observasi, pedoman wawancara, dan daftar telaah dokumen. Keempat, pengumpulan data melalui observasi portal, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Kelima, analisis data berdasarkan lima dimensi evaluasi. Keenam, verifikasi temuan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Rancangan operasional disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Rancangan Evaluasi Portal Satu Data Lombok Tengah Berdasarkan Information System Success Model

Dimensi Evaluasi	Fokus Penilaian	Indikator Operasional	Sumber Data
<i>system quality</i>	Kualitas teknis sistem portal	Aksesibilitas, fitur portal, kecepatan akses, keamanan, infrastruktur, integrasi sistem	Observasi portal, wawancara staf teknis, dokumen SPBE
<i>information quality</i>	Kualitas data dan informasi	Akurasi data, kelengkapan dataset, keterbaruan data, metadata, format data, relevansi data	Observasi dataset, dokumentasi portal, wawancara pengelola data
<i>service quality</i>	Dukungan layanan pengelolaan	Admin portal, SOP, pelatihan operator, pendampingan teknis, koordinasi pengelola data	Wawancara, SOP, dokumen pelatihan
<i>use</i>	Penggunaan portal oleh pengguna	Penggunaan untuk pencarian data, pembaruan data, perencanaan, evaluasi, dan publikasi	Wawancara pengguna, observasi portal, dokumen kinerja
<i>net benefit</i>	Manfaat sistem	Keterbukaan data, efisiensi akses, dukungan pengambilan keputusan, integrasi data sektoral	Wawancara, dokumentasi, hasil observasi

Subjek, Lokasi, Waktu, dan Materi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 1, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini dipilih secara purposive karena Diskominfo merupakan pengelola utama Portal Satu Data Lombok Tengah dan berperan dalam penyelenggaraan urusan komunikasi, informatika, statistik, serta sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Subjek penelitian terdiri atas 6 informan kunci yang dipilih secara purposive. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan, pengoperasian, pemanfaatan, dan pengawasan Portal Satu Data Lombok Tengah. Informan terdiri atas unsur pembuat kebijakan, pengelola portal, staf teknologi informasi, operator data, serta perangkat daerah pengguna atau produsen data. Dasar pemilihan informan adalah relevansi tugas, pengalaman teknis, dan penguasaan informasi terhadap sistem portal.

Objek penelitian adalah Portal Satu Data Lombok Tengah sebagai sistem informasi data terbuka pemerintah daerah. Materi yang diteliti meliputi fitur portal, aksesibilitas sistem, dataset yang dipublikasikan, kualitas metadata, pembaruan data, integrasi sistem,

dukungan infrastruktur, pengelolaan operator, serta pemanfaatan portal dalam perencanaan dan evaluasi. Pengumpulan data berlangsung pada periode 2025–2026. Observasi portal dilakukan secara berkala pada periode tersebut, sedangkan snapshot kuantitatif jumlah dataset, *resources*, dan publikasi yang dilaporkan pada bagian hasil dicatat pada Agustus 2025. Wawancara semi-terstruktur terhadap enam informan dilakukan dalam rentang pengumpulan data yang sama. Untuk menjaga anonimitas, sumber wawancara dilaporkan menggunakan kode I1–I6.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian terdiri atas pedoman observasi portal, pedoman wawancara semi-terstruktur, dan daftar telaah dokumen. Pedoman observasi digunakan untuk menilai aspek teknis portal, seperti struktur menu, ketersediaan dataset, informasi metadata, format file, waktu unggah, fitur organisasi, publikasi, infografik, dan kemudahan akses. Pedoman wawancara digunakan untuk menggali pengalaman informan dalam mengelola, memperbarui, mengakses, dan memanfaatkan portal. Daftar telaah dokumen digunakan untuk menelaah regulasi, SOP pengelolaan data, LKjIP Diskominfo, dokumen SPBE, dokumen pelatihan operator, dan data publikasi portal.

Validasi instrumen dilakukan melalui validasi isi dengan mencocokkan setiap butir pertanyaan dan indikator observasi terhadap dimensi *Information System Success Model*. Butir observasi digunakan terutama untuk menilai *system quality* dan *information quality*; butir wawancara digunakan untuk menggali *service quality*, *use*, dan *net benefit*; sedangkan telaah dokumen digunakan untuk memverifikasi dukungan prosedural, kelembagaan, dan infrastruktur sistem.

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik. Pertama, observasi portal dilaksanakan secara berkala selama 2025–2026 dengan mencermati fitur, dataset, metadata, format file, organisasi pengunggah, dan waktu pembaruan; pencatatan snapshot kuantitatif portal dilakukan pada Agustus 2025. Kedua, wawancara semi-terstruktur dilakukan kepada enam informan kunci (I1–I6) yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan portal. Ketiga, dokumentasi dilakukan dengan menelaah regulasi, SOP, LKjIP, dokumen SPBE, dokumen pelatihan, dan publikasi data yang berkaitan dengan Portal Satu Data Lombok Tengah.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara tematik berdasarkan lima dimensi *Information System Success Model*. Data observasi digunakan terutama untuk menilai *system quality* dan *information quality*; data wawancara digunakan untuk mengidentifikasi *service quality*, *use*, kendala teknis, dan *net benefit*; sedangkan data dokumentasi digunakan untuk menilai dukungan regulasi, prosedur pengelolaan, infrastruktur, dan kesiapan organisasi.

Analisis dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang relevan dikelompokkan ke dalam *system quality*, *information quality*, *service quality*, *use*, dan *net benefit*. Temuan kemudian disajikan dalam narasi dan tabel, lalu diverifikasi melalui triangulasi sumber dan teknik sebelum kesimpulan ditetapkan.

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pengelola portal, staf teknis, operator data, dan perangkat daerah pengguna data. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi portal, dan dokumentasi.

Dengan teknik ini, kesimpulan penelitian tidak hanya bertumpu pada persepsi informan, tetapi juga didukung oleh bukti observasi sistem dan dokumen pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian disusun berdasarkan lima dimensi *Information System Success Model*, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan sistem, dan manfaat sistem. Temuan merupakan hasil triangulasi observasi portal, wawancara enam informan kunci berkode I1-I6, dan dokumentasi.

1. Kualitas Sistem Portal Satu Data Lombok Tengah

Kualitas sistem menunjukkan kemampuan Portal Satu Data Lombok Tengah sebagai sistem informasi berbasis web dalam menyediakan akses, fitur, struktur navigasi, integrasi, dan dukungan infrastruktur. Hasil observasi menunjukkan bahwa portal telah memiliki fitur utama berupa dataset, organisasi, publikasi, infografik, dan informasi umum portal. Fitur tersebut memudahkan pengguna untuk menelusuri data sektoral dari berbagai perangkat daerah melalui satu platform.

Dari aspek aksesibilitas, portal dapat diakses oleh publik dan perangkat daerah tanpa prosedur yang rumit. Pengguna dapat membuka dataset yang telah dipublikasikan, melihat organisasi pengunggah, membaca informasi tahun data, dan mengunduh file yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi fungsi dasar, portal telah mendukung prinsip keterbukaan akses data.

Kualitas sistem belum sepenuhnya optimal karena integrasi data antarperangkat daerah belum berjalan otomatis. Sebagian data masih disampaikan secara manual atau semi-manual kepada pengelola portal, sehingga fungsi portal masih dominan sebagai media publikasi dan belum sepenuhnya menjadi sistem data yang terintegrasi lintas perangkat daerah. Dukungan infrastruktur juga masih memerlukan penguatan pada aspek server, penyimpanan, jaringan, bandwidth, dan keamanan sistem. Temuan observasi ini dikonfirmasi melalui korpus wawancara berkode I1-I6.

Tabel 2
Hasil Evaluasi Kualitas Sistem Portal

Indikator system quality	Temuan	Kondisi Sistem	Implikasi
Aksesibilitas	Portal dapat diakses publik dan perangkat daerah	Cukup baik	Data lebih mudah dijangkau pengguna
Struktur menu	Tersedia menu dataset, organisasi, publikasi, dan infografik	Cukup baik	Navigasi dasar sudah tersedia
Integrasi sistem	Keterhubungan antarperangkat daerah belum otomatis	Belum optimal	Data masih perlu dikirim manual atau semi-manual
Infrastruktur	Server dan layanan digital tersedia	Cukup mendukung	Operasional portal dapat berjalan
Keamanan dan pemeliharaan	Masih membutuhkan penguatan perangkat dan keamanan sistem	Perlu ditingkatkan	Risiko gangguan layanan dan keamanan data perlu diantisipasi
Interoperabilitas	Berbagi pakai data belum sepenuhnya berjalan	Belum optimal	Analisis lintas sektor belum maksimal

Berdasarkan Tabel 2, kualitas sistem Portal Satu Data Lombok Tengah sudah cukup mendukung fungsi dasar sebagai portal data terbuka. Akan tetapi, sistem masih perlu diperkuat pada aspek integrasi, interoperabilitas, pemeliharaan teknis, dan keamanan. Dengan demikian, kualitas sistem belum sepenuhnya mencapai kondisi ideal sebagai sistem informasi pendukung keputusan berbasis data.

2. Kualitas Informasi dan Metadata pada Portal

Kualitas informasi menunjukkan sejauh mana data pada portal memiliki akurasi, kelengkapan, keterbaruan, relevansi, format yang jelas, dan metadata yang memadai. Berdasarkan hasil observasi langsung Portal Satu Data Lombok Tengah dengan snapshot pada Agustus 2025, portal menghimpun 650 dataset dari 62 perangkat daerah, 829 *resources*, dan 67 publikasi. Angka tersebut merupakan kondisi portal pada waktu pengambilan data, bukan angka kumulatif yang diasumsikan tetap setelah periode observasi.

Jumlah dataset yang besar belum sepenuhnya mencerminkan kualitas informasi yang ideal. Observasi menunjukkan pembaruan data antarperangkat daerah belum merata: sebagian perangkat daerah aktif memperbarui data, sedangkan sebagian lainnya memiliki data terbatas atau belum mempublikasikan data. Hasil wawancara yang dianalisis dengan kode I1–I6 digunakan untuk mengonfirmasi kendala pembaruan dan kelengkapan tersebut.

Dari aspek metadata, portal sudah menampilkan informasi dasar seperti judul data, organisasi, tahun, periodisasi, format file, dan waktu unggah. Namun, kelengkapan metadata belum sepenuhnya konsisten pada seluruh dataset. Padahal, metadata penting untuk membantu pengguna memahami konteks data, sumber data, periode pengumpulan, definisi variabel, dan penanggung jawab data. Jika metadata belum lengkap, maka data sulit digunakan secara langsung dalam analisis atau pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil evaluasi, kualitas informasi pada portal sudah mulai terbentuk, tetapi belum sepenuhnya kuat. Permasalahan utama terletak pada pembaruan data, konsistensi metadata, standarisasi format, dan pemerataan kontribusi data antarperangkat daerah. Dengan demikian, portal telah menyediakan informasi yang bermanfaat, tetapi kualitas informasinya masih perlu ditingkatkan agar lebih siap digunakan dalam pengambilan keputusan berbasis data.

3. Kualitas Layanan dan Dukungan Pengelolaan Portal

Kualitas layanan berkaitan dengan dukungan pengelolaan sistem, peran admin portal, pembinaan operator, SOP, pelatihan teknis, dan pendampingan perangkat daerah. Hasil wawancara (I1–I6) dan dokumentasi menunjukkan bahwa Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah menjalankan peran sebagai pengelola utama Portal Satu Data melalui koordinasi data sektoral, pemeriksaan awal, pembinaan operator, dan pendampingan teknis kepada perangkat daerah.

Dari sisi sumber daya manusia, Diskominfo memiliki 40 ASN dan 5 tenaga non-ASN. Komposisi ASN terdiri atas 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris, 3 Kepala Bidang, 2 Kasubbag/Kasi, dan 33 staf. Berdasarkan tingkat pendidikan, terdapat 3 orang S2, 27 orang S1, 5 orang D3, dan 5 orang SLTA. Data ini menunjukkan bahwa secara kuantitas, Diskominfo telah memiliki sumber daya manusia untuk mendukung pengelolaan sistem. Namun,

kemampuan teknis operator dan aparatur dalam pengelolaan metadata, validasi data, pembaruan dataset, dan analisis data masih belum merata.

Dukungan layanan pengelolaan portal sudah tersedia, tetapi perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas operator. Penguatan tidak cukup hanya diarahkan pada kemampuan mengunggah data, tetapi juga pada kemampuan memahami standar data, metadata, kualitas informasi, dan pemanfaatan data dalam proses analisis.

Pengelolaan portal telah didukung regulasi dan SOP, tetapi implementasinya belum seragam di seluruh perangkat daerah. Sebagian perangkat daerah aktif mempublikasikan dan memperbarui data, sedangkan sebagian lain masih memerlukan pendampingan berulang. Temuan wawancara berkode I1–I6 menegaskan bahwa konsistensi koordinasi dan kesiapan operator merupakan bagian penting dari kualitas layanan pengelolaan portal.

4. Penggunaan Portal oleh Perangkat Daerah

Dimensi *use* menunjukkan sejauh mana Portal Satu Data digunakan dalam aktivitas kerja. Berdasarkan wawancara berkode I1–I6 dan telaah dokumen, portal telah digunakan sebagai sumber informasi awal untuk perencanaan, evaluasi, pencarian data sektoral, dan publikasi data. Portal membantu pengguna memperoleh gambaran awal mengenai kondisi sektor tertentu tanpa selalu memulai dari permintaan data manual kepada setiap perangkat daerah.

Namun, penggunaan portal belum sepenuhnya menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan. Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, pengguna masih sering melakukan konfirmasi ulang kepada perangkat daerah terkait. Hal ini disebabkan oleh pembaruan data yang belum merata dan metadata yang belum sepenuhnya konsisten. Dengan demikian, tingkat penggunaan portal masih berada pada tahap pendukung, bukan sebagai sumber final dalam analisis kebijakan.

Penggunaan portal paling kuat terlihat pada fungsi pencarian dan publikasi data. Sementara itu, penggunaan portal untuk analisis lintas sektor dan pengambilan keputusan masih belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa portal sudah digunakan, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam proses kerja pengambilan keputusan berbasis data.

5. Manfaat Sistem dan Kendala Pemanfaatan Portal

Dimensi *net benefit* menunjukkan manfaat yang dihasilkan dari penggunaan portal. Hasil wawancara (I1–I6), observasi, dan dokumentasi menunjukkan manfaat berupa akses data yang lebih terbuka, pencarian informasi sektoral yang lebih cepat, dukungan terhadap transparansi, serta tersedianya sumber informasi awal untuk perencanaan dan evaluasi. Portal juga mengurangi sebagian kebutuhan permintaan data manual antarperangkat daerah.

Namun, manfaat tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala teknis dan nonteknis. Kendala utama meliputi pembaruan dataset yang belum merata, metadata yang belum konsisten, integrasi sistem yang belum otomatis, literasi data aparatur yang belum seragam, serta infrastruktur yang masih memerlukan penguatan. Kendala tersebut menyebabkan portal belum sepenuhnya menjadi sistem informasi pendukung keputusan yang andal.

Manfaat portal telah terlihat pada aspek keterbukaan dan efisiensi akses data. Namun, manfaat sebagai sistem pendukung keputusan masih perlu diperkuat. Portal akan lebih

optimal apabila kualitas data, interoperabilitas, kapasitas operator, dan infrastruktur teknis ditingkatkan secara berkelanjutan.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Portal Satu Data Lombok Tengah ditentukan oleh keterkaitan antara kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, dan manfaat, sebagaimana dijelaskan dalam *Information System Success Model* [18]. Keterbatasan integrasi dan interoperabilitas menunjukkan bahwa kualitas teknis belum cukup apabila aliran data antarperangkat daerah masih bergantung pada proses manual. Pada saat yang sama, ketidakmerataan pembaruan dan metadata mengurangi kemampuan portal menghasilkan informasi yang konsisten dan tepat waktu; karakteristik tersebut merupakan unsur penting kualitas informasi [19].

Pada dimensi *service quality* dan *use*, persoalan utama terletak pada konsistensi dukungan organisasi dan kesiapan operator. Portal telah digunakan untuk pencarian, publikasi, perencanaan, dan evaluasi, tetapi belum menjadi rujukan final ketika pengguna masih perlu melakukan konfirmasi ulang kepada produsen data. Pola ini sejalan dengan pandangan bahwa penggunaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kegunaan, kemudahan, kualitas informasi, dan kepercayaan pengguna terhadap sistem [20]. Dengan demikian, peningkatan penggunaan tidak cukup dilakukan melalui penyediaan fitur; keandalan data dan dukungan layanan harus diperkuat secara bersamaan.

Dari sisi *net benefit*, manfaat paling nyata portal berada pada keterbukaan dan efisiensi akses data. Manfaat sebagai sistem pendukung keputusan masih bersifat berkembang karena bukti yang digunakan dalam proses kebijakan mensyaratkan data yang mutakhir, relevan, dan dapat ditelusuri [6]. Dalam konteks sektor publik berbasis data, kualitas dan tata kelola data juga menjadi prasyarat agar informasi digital benar-benar dapat dipakai dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan [5].

Temuan tersebut konsisten dengan kajian Satu Data Indonesia yang menempatkan interoperabilitas, standar data, koordinasi, dan kapasitas sumber daya manusia sebagai faktor penting implementasi [10]–[12]. Kajian *open government data* juga menunjukkan bahwa keterbukaan data baru menghasilkan nilai ketika data dapat diakses, dipahami, dan digunakan oleh pengguna [7], [8], [13]. Karena itu, kelemahan metadata dan pembaruan data pada portal tidak hanya merupakan persoalan administratif, tetapi langsung memengaruhi reliabilitas bukti yang tersedia bagi proses *evidence-based policy making*.

Implikasi praktis penelitian ini adalah perlunya penguatan yang terintegrasi pada lima area: infrastruktur dan interoperabilitas; pembaruan serta standarisasi metadata; layanan pendampingan dan peningkatan kapasitas operator; penggunaan data portal secara konsisten dalam dokumen perencanaan dan evaluasi; serta integrasi portal dengan proses kerja perangkat daerah. Prioritas tersebut menggeser orientasi portal dari sekadar media unggah data menuju infrastruktur informasi yang mendukung keputusan lintas sektor.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penilaian Portal Satu Data Lombok Tengah sebagai sistem informasi pemerintah daerah, bukan hanya sebagai program keterbukaan data. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa dukungan terhadap *evidence-based policy making* muncul ketika kualitas teknis, kualitas informasi, layanan, penggunaan, dan manfaat

dikelola sebagai satu rangkaian. Dengan demikian, peningkatan jumlah dataset perlu berjalan bersama peningkatan kualitas, keterhubungan, dan pemanfaatannya.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada satu instansi, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, dengan enam informan kunci. Temuan karena itu merepresentasikan konteks pengelolaan portal pada lokasi tersebut dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan ke seluruh pemerintah daerah. Penelitian juga belum mencakup seluruh perangkat daerah, pengguna publik, maupun produsen data sebagai unit analisis yang berdiri sendiri. Penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah informan dan lokasi, serta membandingkan perspektif pengelola, produsen data, dan pengguna portal.

SIMPULAN

Portal Satu Data Lombok Tengah telah dimanfaatkan sebagai sistem informasi data terbuka yang mendukung akses data sektoral, publikasi informasi, dan penyediaan referensi awal bagi pengambilan keputusan berbasis data. Dalam perspektif *Information System Success Model*, fungsi dasar pada dimensi *system quality*, *information quality*, *service quality*, *use*, dan *net benefit* telah terbentuk, tetapi belum optimal. Keterbatasan utama meliputi integrasi dan interoperabilitas yang belum otomatis, pembaruan dataset yang belum merata, metadata yang belum konsisten, serta kapasitas operator yang belum beragam.

Penguatan portal perlu diarahkan pada interoperabilitas sistem, standardisasi metadata, pembaruan dataset berkala, keamanan dan kapasitas infrastruktur, peningkatan literasi data aparatur, serta konsistensi penggunaan portal dalam perencanaan dan evaluasi. Dengan penguatan tersebut, Portal Satu Data Lombok Tengah dapat berkembang dari media publikasi data menjadi sistem informasi yang lebih andal, terintegrasi, dan efektif untuk mendukung *evidence-based policy making* di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. Ndraha, *Kybernologi*. Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta, 2011.
- [2] H. Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta, Indonesia: Grasindo, 2011.
- [3] D. A. Rondinelli, "Government decentralization in comparative perspective: Theory and practice in developing countries," *International Review of Administrative Sciences*, vol. 47, no. 2, pp. 133–145, 1981.
- [4] A. Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press, 2018.
- [5] OECD, *The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector*, OECD Digital Government Studies. Paris, France: OECD Publishing, 2019, doi: 10.1787/059814a7-en.
- [6] S. M. Nutley, I. Walter, and H. T. O. Davies, *Using Evidence: How Research Can Inform Public Services*. Bristol, U.K.: Policy Press, 2007, doi: 10.51952/9781847422323.
- [7] S. Mellouli, L. F. Luna-Reyes, and J. Zhang, "Smart government, citizen participation and open data," *Information Polity*, vol. 19, nos. 1–2, pp. 1–4, 2014, doi: 10.3233/IP-140334.
- [8] N. Mukhlisa and A. Kasim, "Open government data: Open data pada sektor pendidikan dalam mendukung kebijakan," *KOLABORASI: Jurnal Administrasi Publik*, vol. 7, no. 2, pp. 125–143, 2021, doi: 10.26618/kjap.v7i2.5489.
- [9] B. Adinegoro, M. F. A. Ruhuputy, I. Pambudi, and T. Arrahman, "Kebijakan Satu Data Indonesia: Sebuah antitesis semangat keterbukaan dan informasi publik," *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, vol. 16, no. 1, pp. 1–11, 2025, doi: 10.23969/kebijakan.v16i01.21869.
- [10] J. R. Riwakore, L. Marnisah, F. Habaora, and T. Yustini, "Implementation of One Indonesian Data by the Central Statistics Agency of East Nusa Tenggara Province," *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, vol. 1, no. 2, pp. 117–128, 2021, doi: 10.35912/jasispol.v1i2.1194.

- [11] M. J. Islami, "Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs)," *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, vol. 10, no. 1, pp. 13–23, 2021, doi: 10.31504/komunika.v10i1.3750.
- [12] Nuryana and Junaidi, "Implementasi kebijakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, vol. 10, no. 2, pp. 356–383, 2025, doi: 10.36982/jpp.v10i2.5266.
- [13] D. Faedlulloh and F. Wiyani, "Promote good governance in public financial: The practice of local budget (APBD) transparency through Open Data Jakarta in Jakarta Provincial Government," *Jurnal Good Governance*, vol. 15, no. 1, pp. 1–9, 2019, doi: 10.32834/gg.v15i1.41.
- [14] Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, *LKjIP 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah*. Lombok Tengah, Indonesia, 2024.
- [15] Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, "Indeks SPBE Lombok Tengah," 2024. [Online]. Available: <https://data.ntbprov.go.id/dataset?q=indeks+spbe+lombok+tengah>
- [16] Ikhbaluddin, "Strategi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menerapkan teknologi informasi pemerintahan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan," *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, vol. 2, no. 2, pp. 41–57, 2020, doi: 10.33701/jtkp.v2i2.2316.
- [17] F. F. Yudan and M. A. Virgy, "Implementasi Open Government Data oleh Pemerintah Kota Bandung," *Jurnal Transformative*, vol. 7, no. 1, pp. 128–153, 2021, doi: 10.21776/ub.transformative.2021.007.01.6.
- [18] W. H. DeLone and E. R. McLean, "The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update," *Journal of Management Information Systems*, vol. 19, no. 4, pp. 9–30, 2003, doi: 10.1080/07421222.2003.11045748.
- [19] B. H. Wixom and P. A. Todd, "A theoretical integration of user satisfaction and technology acceptance," *Information Systems Research*, vol. 16, no. 1, pp. 85–102, 2005, doi: 10.1287/isre.1050.0042.
- [20] V. Venkatesh, M. G. Morris, G. B. Davis, and F. D. Davis, "User acceptance of information technology: Toward a unified view," *MIS Quarterly*, vol. 27, no. 3, pp. 425–478, 2003, doi: 10.2307/30036540.